**BAB IV**

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN**

**KEBIJAKAN**

**4.1. Visi dan Misi**

**Visi** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat adalah ” ***Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Akuntabel****”*.

Pernyataan visi Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Akuntabel memiliki makna bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Barat harus dilakukan secara bertanggung jawab. Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Mardismo (2004), akuntabilitas publik keuangan daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja keuangan daereah kepada semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tau (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be kept information), dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to) dapat terpenuhi.

Akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal merupakan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak internal yang berkepentingan seperti pegawai, pejabat pengelola keuangan negara, dan badan legislatif. Sedangkan akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan, seperti masyarakat, media massa, pemberi dana bantuan, dan investor atau kreditor.

Namun, konsep pelayanan ini dalam akuntabilitas belum sepenuhnya memadai, maka harus diikuti dengan jiwa eterpreneurship pada pihak-pihak yang melaksanakan akuntabilitas. Konsep pelayanan dalam akuntabilitas selain harus diikuti dengan jiwa eterpreneurship juga harus diikuti dengan jiwa responsiveness. Hal ini harus dilakukan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder sesuai dengan karakteristik Good Governance menurut UNDP dan Word Bank.

Dari bahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan dalam pengelolaan keuangan dan aset harus dapat dilaksakan dengan rasa penuh tanggung jawab dan responsif. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab dan reponsif, maka BPKAD harus menjadi organisasi dengan tata kelola yang baik. Selain itu, BPKAD harus dapat menangkap kebutuhan stakeholders dengan tepat dan cepat serta dapat mengakomodir kebutuhan tersebut.

**Perumusan Visi**

Perumusan visi BPKAD dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Suatu permasalahan pembangunan di BPKAD adalah berbagai permasalahan pembangunan yang berhubu ngan layanan atau peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan terkait. Perwujudan visi BPKAD merupakan gambaran paling sederhana dan dengan bahasa yang mudah dikomunikasikan tentang wujud nyata kondisi, keadaan dan impian BPKAD dalam 5 (lima) tahun yang akan dicapai dimasa mendatang. Untuk memperjelas gambaran suatu perwujudan visi BPKAD dapat ditambahkan dengan atribut atau ciri-ciri lain tentang suatu wujud visi, dengan tabel Perumusan, Perwujudan dan Penjelasan visi dibawah ini.

**Misi**

**Misi** yang dirumuskan untuk mencapai visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah, evaluasi APBD dan Pembinaan Keuangan Daerah Kab./Kota;
2. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah;
3. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan barang milik daerah.

Dari misi yang telah dirumuskan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Misi 1 : Meningkatkan akuntabilitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah, evaluasi APBD dan Pembinaan Keuangan Daerah Kab./Kota;**

Keuangan daerah harus dilaksanakan dengan akuntabel. Akuntabilitas merupan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah agar Keuangan daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Tujuan tersebut harus dapat dicapai dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efesien dan efektif. Beberapa langkah yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan daerah secara efisien adalah dengan peningkatan kompetensi SDM, penggunaan TI dan penyerdehanaan birokrasi. Dengan adanya SDM yang kompeten, didukung dengan TI yang memadai untuk menciptakan birokrasi yang sederhana, maka diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat mengalokasikan sumberdaya yang digunakan untuk melakukan proses pengelolaan keuangan daerah dengan efesien untuk mencapai tujuannya yaitu mendukung proses pembangunan masyarakat. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, BPKAD harus dapat membawa seluruh unsur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan diatas. Namun, tujuan tersebut hanya dapat tercapai dengan pelayanan pengelolaan keuangan yang optimal.

**Misi 2 : Meningkatkan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah**

Cakupan keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa salah satu lingkup pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, efektivitias dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BMD dengan optimal akan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Untuk dapat melaksanakan pengelolaan aset dengan optimal, pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi beberapa aspek antara lain, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, Sumber daya manusia (SDM) yang profesional, anggaran dan juga pengawasan. Aspekaspek tersebut merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi aset daerah

Selain itu, pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan memperhatikan azas berikut :

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

**Misi 3 : Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan barang milik daerah**

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien, efektif, akuntabel, dan optimal harus didukung oleh SDM yang kompeten yaitu SDM yang profesional, integritas dan visioner serta loyal.

Dalam Kamus Kompetensi Jabatan PNS, kompetensi dibedakan menjadi 2, yaitu kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang (BKN, 2002). Kompetensi SDM aparatur adalah potensi aparatur untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Faktor kompetensi SDM aparatur merupakan faktor esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur, diperlukan berbagai strategi karena kompetensi yang memadai merupakan sesuatu yang mutlak perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kompetensi aparaturnya seperti

1. Perencanaan dan pengembangan kualitas PNS, melalui: penyusunan formasi dan analisis jabatan, serta penempatkan pegawai berdasarkan jabatan dan kompetensinya.
2. Peningkatan kualitas SDM, melalui: keikutsertaan dalam diklat dan studi lanjut.

Aspek kedua dalam profesionalisme adalah integritas. Integritas bukan kata atau istilah Indonesia, tetapi berasal dari bahasa inggris yang berarti “*the quality of being honest and of always having high moral principles*”. Integritas menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia yang luhur dan berbudi. Tuntutan terhadap peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur birokrasi, karena didorong sebagai bagian dari proses untuk mewujudkan desentralisasi yang efisien, pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Integritas merupakan isu penting yang harus ditindaklanjuti sekaligus dijadikan sebagai sikap dan komitmen oleh segenap aparatur pemerintah tanpa kecuali untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Salah satu upayanya dengan mengembangkan kebijakan dan penegakan sistem integritas birokrasi, yang merupakan prasyarat penting untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

**4.2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan BPKAD dalam melaksanakan tupoksinya adalah:

1. Mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang handal dan terintegrasi berbasis teknologi informasi serta Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah kab./Kota yang akuntabel dan taat azaz;
2. Mewujudkan manajemen pengelolaan barang daerah yang tertib dan optimal yang terintegrasi berbasis teknologi informasi;
3. Mewujudkan manajemen pengelolaan sdm keuangan dan barang milik daerah Profesional dan kompeten.

Pencapaian tujuan diatas, dapat diukur dengan pemenuhan beberapa indikator dibawah, meliputi:

**Tabel 4.1**

**Perumusan Indikator Tujuan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | Tujuan | Indikator Tujuan |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang handal dan terintegrasi berbasis teknologi informasi serta Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah kab./Kota yang akuntabel dan taat azaz | Tersusunnya LKPD Tepat Waktu |
| 2 | Mewujudkan manajemen pengelolaan barang daerah yang tertib dan optimal yang terintegrasi berbasis teknologi informasi | Terintegrasinya Sistem Informasi Akuntansi dengan Sistem Informasi Barang Milik Daerah |
| Ketersediaan Informasi Barang Milik Daerah |
| Tingkat Optimalisasi Aset Daerah |
| 3 | Mewujudkan manajemen pengelolaan sdm keuangan dan barang milik daerah profesioal dan kompeten | Tingkat kompetensi pengelola keuangan dan Barang Milik Daerah |

**Sasaran**

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah;
3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Pencapaian sasaran diatas, dapat diukur dengan pemenuhan beberapa indikator dibawah, meliputi:

**Tabel 4.2**

**Perumusan Indikator Sasaran**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Utama (IKU)** | **2017** | **2018** |
|
| 1 | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Perda dan Pergub APBD/APBD Perubahan Tepat Waktu | 4 Dokumen | 4 Dokumen |
| Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota tepat waktu | 3 Dokumen | 3 Dokumen |
| Terselenggaranya koordinasi, fasilitasi, evaluasi, dan pembinaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota | 100% | 100% |
| Prosentase SP2D yang diterbitkan Tepat Waktu | 100% | 100% |
| Tingkat akurasi input data dan rekonsiliasi data keuangan | 100% | 100% |
| Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Opini BPK – WTP | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah | Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi | 100% | 100% |
| Tersusunnya dan Terpenuhinya Kebutuhan Aset Daerah | 100% | 100% |
| Tingkat akurasi input Aset Daerah | 100% | 100% |
| Aset Tanah Yang tersertifikasi | 100% | 100% |
| pengamanan Barang Milik Daerah | 100% | 100% |
| Aset Yang Dimanfaatkan | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Terselenggaranya Pembinaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah | 100% | 100% |

Berikut rumusan tujuan, sasaran beserta indikatornya:

**Tabel 4.3**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **Tujuan** | **Indikator Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Utama (IKU)** | **2017** | **2018** |
| 1 | Mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang handal dan terintegrasi berbasis teknologi informasi serta Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah kab./Kota yang akuntabel dan taat azaz | Tersusunnya LKPD Tepat Waktu | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Perda dan Pergub APBD/APBD Perubahan Tepat Waktu | 4 Dokumen | 4 Dokumen |
| Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota tepat waktu | 3 Dokumen | 3 Dokumen |
| Terselenggaranya koordinasi, fasilitasi, evaluasi, dan pembinaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota | 100% | 100% |
| Prosentase SP2D yang diterbitkan Tepat Waktu | 100% | 100% |
| Tingkat akurasi input data dan rekonsiliasi data keuangan | 100% | 100% |
| Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Opini BPK – WTP | 100% | 100% |
| 2 | Mewujudkan manajemen pengelolaan barang daerah yang tertib dan optimal yang terintegrasi berbasis teknologi informasi | Terintegrasinya Sistem Informasi Akuntansi dengan Sistem Informasi Barang Milik Daerah | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah | Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi | 100% | 100% |
| Tersusunnya dan Terpenuhinya Kebutuhan Aset Daerah | 100% | 100% |
| Ketersediaan Informasi Barang Milik Daerah | Tingkat akurasi input Aset Daerah | 100% | 100% |
| Aset Tanah Yang tersertifikasi | 100% | 100% |
| Tingkat Optimalisasi Aset Daerah | pengamanan Barang Milik Daerah | 100% | 100% |
| Aset Yang Dimanfaatkan | 100% | 100% |
| 3 | Mewujudkan manajemen pengelolaan sdm keuangan dan barang milik daerah profesioal dan kompeten | Tingkat kompetensi pengelola keuangan dan Barang Milik Daerah | Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Terselenggaranya Pembinaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah | 100% | 100% |

**4.3. Strategi dan Kebijakan**

Dalam melakukan perumusan strategiyang akan dilakukan, kita harus dapat memperhatikan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan pemanfaatan sistem informasi, posisi organisasi yang lebih baik, peningkatan relasi dan wawasan aparatur BPKAD. Selain itu, BPKAD juga dapat memanfaatkan peluang yang ada agar dapat dimanfaatkan sebagai dukungan bagi BPKAD dalam melaksanakan tupoksinya seperti peran BPKAD yang strategis, mudah berkoordinasi dengan pusat, kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan asset yang masih bisa dikembangkan, komitmen pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan aset daerah dan cukup banyaknya aset daerah, yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah.

Kemudian selain memanfaatkan kekuatan dan peluang, BPKAD juga akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti :

1. Standarisasi beban kerja;
2. Sarana prasarana yang sudah tidak memadai;
3. Pengembangan dan pemanfaatan ATISISBADA disetiap OPD belum optimal;
4. SOP (Standard Operating Procedure) yang menjadi pedoman bagi personil OPD dalam pelaksanaan tupoksi pengelolaan keuangan dan BMD belum dimiliki;
5. Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif efisien dan akuntabel;
6. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan;
7. Masih adanya aset di SKPD yang belum dioptimalkan;
8. Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan keuangan dan asset;
9. Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) mengenai penyusunan anggaran dan pengelolaan aset yang belum jelas;
10. Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset-aset milik daerah;
11. Belum tegasnya sanksi terhadap kelalaian dalam jual beli aset daerah;
12. Belum terselesaikannya penanganan hukum beberapa aset - aset bermasalah.

Kedepan, BPKAD juga harus dapat menjawab tantangan yang ada seperti:

1. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan asset di OPD;
2. Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi, inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi;
3. Masyarakat semakin kritis informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat;
4. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah;
5. Bertambahnya anggaran yang menimbulkan meningkatya jumlah paket pengadaan barang dan jasa;
6. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance;
7. Penerapan system akuntansi berbasis accrual;
8. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK;
9. Fasilitas pengelola barang yang belum memadai;
10. Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa;
11. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.

Dalam melakukan perumusan strategi, BPKAD menggunakan metode balance *scorecard* untuk memetakan arah dan tahapan pencapaian tujuan organisasi.

Balanced scorecard merupakan salah satu tools manajemen yang cukup populer digunakan di dunia. Tidak hanya untuk organisasi profit, balanced scorecard juga dapat diterapkan pada instansi pemerintah. Pada prinsipnya, Balanced Scorecard merupakan tools yang digunakan untuk memetakan strategi dan menterjemahkan strategi menjadi rencana aksi. Sehingga, dengan balanced scorecard organisasi dapat mendefinitifkan strategi yang bersifat normatif.

Untuk mencapai visi organisasi yaitu menjadi pengelola keuangan dan aset yang profesional dalam mewujudkan Jawa Barat yang maju dan sejahtera untuk semua, harus di dukung dengan adanya capaian pada beberapa prespektif. Visi organisasi dapat dicapai jika area pada prespektif *Stakeholders* dapat terpenuhi. Pada prespektif *Stakeholders* menjelaskan bagai mana BPKAD melakukan pelayanan secara optimal yang di bagi kedalam 3 area yaitu administrasi keuangan, pengelolaan aset dan penyusunan serta evaluasi anggaran.

Untuk memenuhi 3 area pada prespektif *Stakeholders*, BPKAD harus memperkuat proses bisnis yang ada di internal BPKAD. Perbaikan internal bisnis proses dibagi menjadi 4 area yaitu SOP pengelolaan keuangan dan aset yang terintegrasi, TI pengelolaan keuangan dan aset yang terintegrasi, Proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, dan implementasi SPIP dalam rangka menjalankan *good governance.*

Perbaikan proses bisnis internal hanya dapat dilaksanakan jika didukung oleh SDM yang memadai. Maka, prespektif SDM merupakan prespektif dasar yang harus di perkuat oleh organisasi. Area yang akan kami perkuat untuk memperkuat SDM adalah peningkatan profesionalisme dan loyalitas SDM, pemenuhan ZI dan peninglatan kesejahteraan aparatur.

Dari konsep diatas maka disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari yaitu;

1. Membuat peta pemenuhan ZI;
2. Penyusunan Dokumen SOP dan petunjuk teknis serta jadwal pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melibatkan seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3. Optimalisasi sarana dan sarana sebagai penunjang pelayanan prima;
4. Menyusun rencana pengembangan dan peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM;
5. Evaluasi maturitas SPIP dan menyusun rencana aksi;
6. Mengembangkan aplikasi keuangan dan aset daerah yang terintegrasi dan mendukung data real time yang tepat dan akurat;
7. Menyiapkan instrumen ABK;
8. Menyusun grand desain sistem informasi yang terintegrasi;
9. Melakukan pendataan aset dan mengoptimalkan pemanfaatan aset;
10. Menyusun identifikasi permasalahan aset dan membuat rencana aksi penyelesaiannya yang melibatkan seluruh pihak terkait;
11. Melakukan perbaikan administrasi dalam organisasi dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berikut rumusan tujuan, indikator kinerja, dan strategi yang akan dilaksanakan untuk memenuhi indikator kinerja dan sasarannya:

**Tabel 4.4**

**Perumusan Strategis BPKAD Provinsi Jawa Barat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Strategi |
| 1 | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Perda dan Pergub APBD/APBD Perubahan Tepat Waktu | * Penyusunan Dokumen SOP dan petunjuk teknis serta jadwal pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melibatkan seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Barat * Evaluasi maturitas SPIP dan menyusun rencana aksi * Menyiapkan instrumen ABK * Mengembangkan aplikasi keuangan dan aset daerah yang terintegrasi dan mendukung data real time yang tepat dan akurat |
| Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota tepat waktu |
| Terselenggaranya koordinasi, fasilitasi, evaluasi, dan pembinaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota |
| Prosentase SP2D yang diterbitkan Tepat Waktu |
| Tingkat akurasi input data dan rekonsiliasi data keuangan |
| Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu |
| Opini BPK – WTP |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah | Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi | * Mengembangkan aplikasi keuangan dan aset daerah yang terintegrasi dan mendukung data real time yang tepat dan akurat * Menyusun grand desain sistem informasi yang terintegrasi |
| Tersusunnya dan Terpenuhinya Kebutuhan Aset Daerah | Melakukan pendataan aset dan mengoptimalkan pemanfaatan aset |
| Tingkat akurasi input Aset Daerah | Melakukan perbaikan administrasi dalam organisasi dan pengelolaan keuangan dan aset daerah |
| Aset Tanah Yang tersertifikasi | Menyusun identifikasi permasalahan aset dan membuat rencana aksi penyelesaiannya yang melibatkan seluruh pihak terkait |
| pengamanan Barang Milik Daerah |
| Aset Yang Dimanfaatkan | Optimalisasi sarana dan sarana sebagai penunjang pelayanan prima |
| 3 | Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Terselenggaranya Pembinaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah | * Menyusun rencana pengembangan dan peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM * Membuat peta pemenuhan ZI |

Berikut beberapa alternatif strategi yang dapat dilaksanakan oleh BPKAD dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal dalam menjalankan tupoksinya:

**Tabel 4.5**

**Alternative Strategi BPKAD Provinsi Jawa Barat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KAFI**  **KAFE** | **Kekuatan (S):**   1. Posisi organisasi baru yang lebih kuat dan independen 2. Kualitas SDM Internal organisasi 3. Komitmen pimpinan dan karyawan yang Tinggi 4. Organisasi di isi oleh SDM yang sudah berpengalaman 5. Sistem informasipengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaanpenganggaran,penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel 6. Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah maupun optimalisasi pengelolaan aset daerah. 7. Sertifikasi keahlian aparatur. | **Kelemahan (W):**   1. Standarisasi beban kerja 2. Sarana prasarana yang sudah 3. tidak memadai 4. Pengembangan dan pemanfaatan ATISISBADA disetiap OPD belum optimal 5. SOP (Standard Operating Procedure) yang menjadi pedoman bagi personil OPD dalam pelaksanaan tupoksi pengelolaan keuangan dan BMD belum dimiliki 6. Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif efisien dan akuntabel 7. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan 8. Masih adanya aset di SKPD yang belum dioptimalkan 9. Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan keuangan dan asset 10. Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) mengenai penyusunan anggaran dan pengelolaan aset belum jelas 11. Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset-aset milik daerah 12. Belum tegasnya sanksi terhadap kelalaian dalam jual beli aset daerah 13. Belum terselesaikannya penanganan hukum beberapa aset - aset bermasalah |
| **Peluang (O)** | **Alternatif Strategi (S-O)** | **Alternatif Strategi (W-O)** |
| 1. Peran BPKAD yang strategis 2. Mudah berkoordinasi dengan pusat 3. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan asset yang masih bisa dikembangkan 4. Komitmen kepala daerah untuk menyelesaikan permasalahan aset daerah 5. Cukup banyaknya aset daerah, yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah | 1. Peningkatan Kompetensi BPKAD; 2. Peningkatan Eksistensi BPKAD; 3. Membentuk rencana penyelesaian permasalahan aset dan melibatkan kepala daerah; 4. Mengoptimalkan aset untuk meningkatkan pelayanan dan PAD; 5. Melakukan kordinasi secara rutin dengan Pusat dalam rangka menyelesaikan permasalahan aset; 6. Peningkatan Relasi dan wawasan Aparatur BPKAD. | 1. Menetapkan beban kerja dan SKI; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelola aset; 3. Mengembangkan pemanfaatan SISBADA di OPD; 4. Menganalisa dan memperbaiki SOP pengelolaan keuangan dan aset; 5. Menyiapkan instrumen ABK; 6. Meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur Pengelolaan keuangan; 7. Melakukan pendataan aset dan mengoptimalkan pemanfaatan aset; 8. Melakukan integrasi sistem pengelolaan keuangan dan aset. 9. Menyusun standar dan pedoman kerja penyusunan dan evaluasi anggaran 10. Menyusun identifikasi permasalahan hukum aset dan membuat rencana aksi. 11. Membuat prosedur rinci dan meningkatkan pengawasan terhadap proses jual belu aset daerah |
| **Tantangan (T)** | **Alternatif Strategi (S-T)** | **Alternatif Strategi (W-T)** |
| 1. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan asset 2. Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi, inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi; 3. Masyarakat semakin kritis informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat 4. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah 5. Bertambahnya anggaran yang menimbulkan meningkatya jumlah paket pengadaan barang dan jasa 6. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance 7. Penerapan system akuntansi berbasis accrual 8. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK 9. Fasilitas pengelola barang yang belum memadai 10. Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa 11. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat | 1. Meningkatkan Kinerja Aparatur; 2. Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan SKPD terkait; 3. Mengsosialisasikan penerapan E-goverment ke seluruh SKPD; 4. Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan; 5. Mengatur keterbukaan informasi kepada masyarakat; 6. Menyediakan media untuk memberikan informasi kepada masyarakat; 7. Meningkatkan fasilitas pengelola barang dan bendahara; 8. Melakukan perencanaan pengadaan, menyusun SOP pengadaan, dan menetapkan waktu pelaksanaannya; 9. Melakukan sosialisasi akuntansi berbasis akrual; 10. Melakukan sosialisasi peraturan; | 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dengan pemeriksa; 3. Mnyusun dan melakukan evaluasi SOP; 4. Melakukan optimalisasi aset untuk menignkatkan pelayanan. |

**Kebijakan**

Kebijakan, mensinerjikan lingkungan strategis dalam bentuk IFAS dan EFAS dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam *critical success factors* untuk menemukan leverage sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistemik, untuk itu dalam implementasinya dilakukan langkah-langkah yang tergambar dalam diagram sebagai berikut:

**Bagan 4.1**

**Tahapan Kebijakan BPKAD Provinsi Jawa Barat**

**Manajemen Strategik Menurut Inpres No.7 Tahun 1999**



Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

1. Pola kemitraan pemerintah dan stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Sinergitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan administrasi perkantoran;
4. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan masyarakat dan administrasi perkantoran;
6. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam sistem informasi;
7. Sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efektif dan efisien berdasarkan peraturan dan perundang-undangan;
8. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur;
9. Optimalisasi pemanfaatan aset untuk mendukung pelayanan.

Berikut rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi yang diturunkan menjadi kebijakan:

**Tabel 4.6**

**Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan SKPD Provinsi Jawa Barat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VISI : | | | |
| Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Akuntabel | | | |
| MISI : | | | |
| Meningkatkan akuntabilitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah serta Meningkatkan pelayanan evaluasi APBD dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab./Kota | | | |
| Meningkatkan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah | | | |
| Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan barang milik daerah | | | |
| TUJUAN | SASARAN | Strategi | Kebijakan |
|
| Mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang handal dan terintegrasi berbasis teknologi informasi serta Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah kab./Kota yang akuntabel dan taat azaz | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Penyusunan Dokumen SOP dan petunjuk teknis serta jadwal pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melibatkan seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Barat | Pola kemitraan pemerintah dan stakeholder dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah |
| Evaluasi maturitas SPIP dan menyusun rencana aksi | Sinergitas pengelolaan keuangan dan aset daerah |
| Menyiapkan instrumen ABK | Penyusunan anggaran dengan optimal |
| Mengembangkan aplikasi keuangan dan aset daerah yang terintegrasi dan mendukung data real time yang tepat dan akurat | Integrasi sistem informasi |
| Mewujudkan manajemen pengelolaan barang daerah yang tertib dan optimal yang terintegrasi berbasis teknologi informasi | Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah | Mengembangkan aplikasi keuangan dan aset daerah yang terintegrasi dan mendukung data real time yang tepat dan akurat | Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam sistem informasi |
| Menyusun grand desain sistem informasi yang terintegrasi | Sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efektif dan efisien berdasarkan peraturan dan perundang-undangan |
| Melakukan pendataan aset dan mengoptimalkan pemanfaatan aset | Optimalisasi pemanfaatan aset untuk mendukung pelayanan |
| Melakukan perbaikan administrasi dalam organisasi dan pengelolaan keuangan dan aset daerah | Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah |
| Menyusun identifikasi permasalahan aset dan membuat rencana aksi penyelesaiannya yang melibatkan seluruh pihak terkait | Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan masyarakat dan administrasi perkantoran |
|  |  |
| Mewujudkan manajemen pengelolaan sdm keuangan dan barang milik daerah profesioal dan kompeten | Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah | Menyusun database kompetensi pengelola aset dan barang daerah dan membuat rencana pemenuhan kompetensi jangka panjang | Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur |
| menyusun pedoman kerja dan kriteria koordinasi, fasilitasi, evaluasi, dan pembinaan keuangan dan aset daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota |
| Meningkatkan kemampuan SDM dalam penggunaan TI |